

**DEMISTIFIKASI MEMUDARNYA PERAN NEGARA DALAM
NEOLIBERALISME**

(Perdagangan Bebas dan Konflik Antar Negara dibawah Rezim WTO)

Oleh : M. Chairil Akbar

ABSTRAKSI

World economic order after the ratification of GATT (General Agreement On Tarrifs and Trade) shows some contractions and a number of controversies. The broadening of trade agenda in Uruguay round was a new phase of agreement among the countries. Ministerial meeting 1986 produced a declaration called Punta del Este. This consensus creates the establishment of WTO as the only multilateral institution to mediate any cooperations of global trade. WTO itself palys its role to sustain and make sure that the agenda of trade liberalization runs optimally. Nevertheless, amidst the euphoria of trade liberalization discourse, some problems and polemic come up.

They appear due to inconsistency of developed countries which implement protectionism policy on their some sectors of trade. Third world group then build a coalition to refuse every form of deception in free trade policy. This condition has caused the emergence of internal friction in the body of WTO

In this paper, the author will try to analyze and explain the dynamic of trade liberalization policy among the countries after the establishment of WTO. The main focus are on 2 questions, first, why is there conflict of interest in WTO?, and second, how is the dialectical relation of protectionism with free trade system between developed countries and developing countries? Subsequently, we will obtain a hypothese that market liberalization is never fully implemented instead. Doctrine of free market and the elimination of trade handicaps are not executed consistently by

developed countries. Third world countries even tend to be dictated and suppressed to eliminate all kinds of trade handicaps. This handicap include some regulations like subsidy, tariff, quota, or taxation. So the consequence is the destruction or domestic market in third world due to their incompetence of capital against MNC and developed countries.

Market liberalization under neoliberalism can be stated as a new form of Unilateralism in Economy. Stronger and more advanced countries manage to impose their national interest on many trade agreements. The massive integration of world economy has created disparity and imbalanced competition. World is divided by a world gigantic power of capital which exploit third world. Through the mechanism of capital and trade liberalization, our reality is underpinned by domination and monopoly. Globalization of economy has become a trap for south countries which keeps maintaining wealth accumulation only to few capitalist and developed countries

This writing aims to problematize the inconsistent rules implementation within WTO in term of trade policies among countries. Trade liberalization has been mostly taken for granted which in turn covers up certain form of protectionism on some strategic commodities. It has sparked debates about the role of WTO whether it can truly liberalize trade policies or it has surrendered to the strong and significant role of government intervention in advanced countries.

Keywords : Trade Liberalization, Subsidy, Protectionism, General Agreement On Tarrifs and Trade, Neoliberalism

LATAR BELAKANG

Fenomena kerjasama perdagangan dunia paska ratifikasi GATT (General Agreement on Tarrifs and Trade) 1944, menunjukan kontraksi dan sejumlah perubahan elementer. Perluasan agenda perdagangan pada putaran Uruguay 1986 merupakan babak baru perundingan antar Negara sejak perang dunia II yang telah

melibatkan 123 negara.¹ Kesepakatan yang dibangun pada perundingan ini menandai era lahirnya standard tunggal model kerjasama perdagangan multilateral dalam kerangka WTO (World Trade Organization). Namun ditengah perdagangan yang semakin berkembang, kebijakan yang berwatak proteksionisme masih cenderung dipraktekan. Tuduhan ini justru diluncurkan oleh kelompok Negara dunia ketiga dalam memandang aksi sejumlah Negara maju yang menyuntikan subsidi di beberapa sektor. Selain itu, pergeseran isu perdagangan yang signifikan sebagai akibat tekanan yang dilancarkan oleh AS dan Negara maju lainnya, ikut menaikkan eskalasi perpecahan internal dalam rezim perdagangan global. Berdasarkan catatan WTO sendiri terdapat lebih dari 500 sengketa perdagangan antar negara dari 1995 sampai 2016.² Sebagian besar dari konflik yang ada menunjukkan adanya pertarungan antara Negara maju dengan dengan negara sedang berkembang. Visi yang menghendaki model ekonomi yang lebih terbuka kini mulai terbentur oleh karakter dasar berupa realisasi kepentingan nasional Negara masing-masing. Dengan demikian, persoalan terbesarnya kini justru terulang yakni bagaimana mengeliminir proteksionisme tersebut.

Kondisi ekonomi dunia ketiga dibawah liberalisasi perdagangan justru cenderung terpojok. Banyak aturan dalam WTO yang membawa implikasi negative bagi kehidupan rakyat. Eliminasi bea masuk, pajak, tariff atau peningkatan kuota adalah kebijakan yang dinilai memukul sektor ekonomi menengah kebawah. Tulisan ini berupaya menguji implementasi beserta doktrin liberalisasi pasar melalui skema Perdagangan Bebas (Free Trade) dalam kerangka WTO. Menginvestigasi kembali asumsi bahwa peran negara yang semakin memudar dalam era globalisasi neoliberal. Penulis bermaksud menganalisa relasi dialektis negara dengan pasar dalam tinjauan historis dan kasus sengketa perdagangan internasional.

KERANGKA BERPIKIR

¹ https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm

² Untuk informasi lebih lanjut, WTO menyajikan data terkait ini secara lengkap. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm

1. Neoliberalisme

Awalan neo (baru) yang melekat pada istilah Neoliberalisme mengacu pada kebangkitan kembali tata ekonomi 30 tahun terakhir pada masa kejayaan Liberalisme pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Neoliberalisme, pada dasarnya merupakan sebuah teori yang bertujuan untuk membuat perdagangan antar-negara menjadi lebih mudah, bagaimana membebaskan pergerakan barang, jasa, sumber daya alam, tenaga kerja, dan perusahaan-perusahaan dalam mendapatkan sumber daya maupun tenaga kerja yang murah untuk dapat memaksimalkan keuntungan. Neoliberalisme secara teoritis diturunkan dari konsep minimalisasi peran pemerintah atau *Laissez Faire* dalam arena ekonomi yang ditulis oleh Adam Smith dalam *Wealth Of Nations*, 1776. Namun begitu, Neoliberalisme merupakan versi radikal dari Liberalisme klasik. Secara konseptual, kebebasan individu atau sektor swasta dianggap sebagai harga mati yang pada gilirannya menyingkirkan intervensi negara secara drastic. Fondasi intelektual gagasan ini terutama berasal dari karya Ekonom terkemuka asal Austria yakni Friedrich Von Hayek dan Milton Friedman asal Amerika Serikat. Keduanya secara berturut-turut meyakini bahwa langkah-langkah interventif negara dalam redistribusi kesejahteraan dan pendekatan kebijakan fiskal (fiscal policy) sebagai cara untuk mempengaruhi siklus bisnis harus ditolak.³ Keduanya dianggap tidak efisien dalam menggenjot investasi demi pertumbuhan ekonomi. Ekspansi bisnis harus mendapat prioritas kebijakan ekonomi lewat jaminan kebebasan seluas-luasnya.

Kredo inti neoliberalisme meliputi pertumbuhan ekonomi; pentingnya pasar bebas untuk merangsang pertumbuhan; pasar bebas yang tak terbatas; pilihan individual; pemangkasan regulasi pemerintah dan dukungan pada

³ Smith, Nicola, Neoliberalism, Encycopedy of Britannica, <https://www.britannica.com/topic/neoliberalism>

model pembangunan sosial yang evolusioner sesuai dengan pengalaman Barat yang diyakini dapat diterapkan di seluruh dunia⁴.

Secara umum, liberalisasi mengacu pada pengurangan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam perdagangan, baik dalam lingkup domestik maupun internasional dengan tujuan meningkatkan perdagangan serta investasi. Liberalisasi menghendaki adanya pembebasan pasar ataupun perdagangan dari peraturan-peraturan pemerintah yang dianggap bisa menghambat terjadinya arus pasar bebas. Dalam sistem internasional, hal ini dicontohkan dengan pemberlakuan pajak atau tarif bea masuk perdagangan antar negara yang sangat rendah agar arus barang, modal maupun jasa dari suatu negara ke negara lain lebih mudah dan bebas. Hal ini tentu akan mendorong investasi yang diperlukan oleh negara manapun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, liberalisasi juga berarti pemberian wewenang atau kesempatan yang lebih luas bagi para investor, yaitu pemerintah memfasilitasi investor dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan bagi mereka, misalnya saja pemberlakuan undang-undang penanaman modal yang mengatur penggunaan hak usaha atas tanah dengan tempo waktu yang lama maupun penguasaan saham oleh MNC atau para investor. Liberalisasi merupakan komponen kebijakan yang penting dalam mencapai masyarakat pasar yang menganut pandangan bahwa perdagangan merupakan alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Bentuk-bentuk Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Area) maupun regionalisme adalah contoh konkrit dari upaya menyelenggarakan Perdagangan internasional yang terbuka, bebas, dan transparan.

Untuk memperlancar arus perdagangan, maka sejak tahun 1948-1994, GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), memuat berbagai peraturan

⁴ Manfred B. Streger, *Globalisme-Bangkitnya Ideologi Pasar-*, Lafadl, 2002, Jogjakarta, hal 20

perdagangan dunia untuk mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. Masalah-masalah mengenai perdagangan diselesaikan melalui serangkaian perundingan multilateral yang dikenal sebagai Putaran Perdagangan (*trade round*) sebagai upaya mendorong liberalisasi perdagangan. Pada tahun-tahun awal, GATT mengkonsetrasikan pada upaya pengurangan dan penurunan tarif dan pada tahun 1960, di Putaran Kennedy, GATT berhasil mengeluarkan Persetujuan Anti Dumping (Anti Dumping Agreement). Dengan terbukanya akses terhadap perdagangan internasional, suatu negara bisa mendapatkan keuntungan, misalnya saja akumulasi pendapatan kapital domestik karena perdagangan, maupun alokasi sumber daya. Namun disisi lain, liberalisasi juga memiliki dampak negatif. Liberalisasi membawa pada konsekuensi pengadaan impor yang semakin besar, yang dapat mengancam produk-produk domestik, jika ia tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing di pasar internasional.

2. Merkantilisme

Merkantilisme secara umum merujuk pada strategi perdagangan dan pembangunan ekonomi yang berbasis pada intervensi negara. peran pemerintah bersifat sangat sentral dalam mengatur dan menyusun kerangka dasar aktifitas ekonomi nasionalnya. Pada konteks inilah komponen politik kekuasaan bersinggungan dengan kekuatan pasar (*market competition*). Negara berada pada posisi yang lebih superior dibanding actor-aktor dan kelompok kepentingan domestic lain.⁵ Merkantilisme menunjukkan kemiripan konseptual dengan Realisme dalam arena politik internasional, yang pada gilirannya istilah merkantilisme sering dipertukarkan dengan Realisme Ekonomi. Merkantilisme termanifestasi pada formulasi kebijakan yang sangat proteksionis, seperti : pembatasan import, pemberian subsidi tinggi, control harga, monopoli pasar, hingga perlindungan pasar dalam negeri.

⁵ Kirshner, Jonathan, *Mercantilism*, hal. 433, dalam *Encyclopedia of International Political Economy*, Barry Jones, R. J. Roudtlege Publishing, 2001, New York.

Ekonomi internasional merupakan arena konflik antar kepentingan nasional. Negara-negara berada dalam lingkaran *zero sum game* dimana keuntungan bagi satu negara adalah kerugian bagi negara lain. Sejak abad 16, periode merkantilisme ditandai oleh pergeseran orientasi ekonomi negara-negara imperialis dari perebutan sumber-sumber emas (Spanyol), perdagangan (Belanda), hingga industrialisasi (Inggris).⁶ Kebijakan merkantilis baik secara teoritis maupun praksis mengambil jarak dari arus liberalisme ekonomi yang berjangkar pada mekanisme pasar. Sehingga, factor politik mengambil porsi lebih dalam merancang dan menjalankan strategi pembangunan ekonomi. Unit usaha swasta, individu maupun kelompok, hanya menjadi instrument kepentingan negara dengan otonomi dan kebebasan minimal.

KEDAULATAN DAN SUPREMASI NATION-STATE DALAM EKONOMI GLOBALISASI NEOLIBERAL

Pertanyaan apakah peran negara memudar dalam era Neoliberalisme dapat dijawab lewat 2 jenis analisa. Pertama, Sejarah Politik Internasional sebelum abad 20. Dan kedua, relasi dialektis antara Pasar dan Negara. hal ini dapat menggambarkan perkembangan khas dan kontekstual kerjasama ekonomi internasional. Keduanya dapat membantu menjelaskan mengapa kekuasaan pasar atas negara dapat didemistifikasi. Menunjukkan persilangan kepentingan antar negara yang tarik menarik dengan dinamika kapitalisme, atau dalam konteks ini adalah perdagangan internasional.

Tinjauan historis menyangkut perdagangan antar negara dapat menjadi titik tolak untuk menjelaskan ambivalensi fungsi negara dan esensi kapitalisme. Kebebasan pasar dan kekuasaan negara yang saling tumpang tindih ini bukanlah hal baru. Sebelum abad 20 perdagangan internasional didominasi oleh campur tangan

⁶Jackson, Robert, Sorensen, Georg, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, hal. 287, Pustaka Pelajar, 2013, Yogyakarta.

negara dan motif politik yang kental. Skema perdagangan antar negara cenderung tertutup, selektif, dan sangat taktis. Selama lebih dari 500 tahun sejarahnya, kapitalisme lewat perdagangan internasional diarahkan oleh kebijakan-kebijakan merkantilis yang melibatkan pembatasan ketat oleh negara pada import dan pemberian insentif bagi eksport.⁷ Upaya tersebut jelas mencerminkan fungsi *State Power* atau kekuasaan negara adalah bagian sentral dalam dinamika ekonomi internasional. Kekuatan pasar di pihak lain bekerja sebagai turunan yang bersifat adaptif terhadap konflik kepentingan antar negara.

Peta politik dunia sebelum abad 20 menjadi krusial untuk diperhatikan. Imperialisme beberapa negara Eropa terutama Inggris memainkan peran strategis. Regulasi dan monopoli perdagangan adalah hal lazim di setiap kebijakan ekonomi nasionalnya. Inggris pada tahun 1846 memperkenalkan Undang-Undang yang disebut British Corn Law, sebuah regulasi yang membatasi secara ketat impor komoditas pertanian.⁸ Dalam Undang-Undang ini semua petani di Inggris, baik yang skala kecil maupun besar, dilindungi oleh tariff khusus terhadap barang import pertanian.⁹ Kontrol ekonomi mengemuka dengan tujuan memelihara kedaulatan dan supremasi imperium negara dalam bentuk Merkantilisme.

Dominasi kekayaan kerajaan terlihat pada ekstraksi sumber daya alam terhadap negara-negara koloni. Eksploitasi ekonomi di daerah jajahan umumnya dijalankan secara militeristik bahkan lewat kerja paksa. Ranah distribusi kekuatan imperial tidak hanya berasal dari dalam negeri namun juga dari luar negeri. Negara colonial memaksa daerah-daerah koloninya untuk melakukan perdagangan dengan negara induk, memaksa untuk menjual sebagian besar komoditasnya, membayarnya dibawah harga pasar dunia terutama untuk komoditas pertanian.¹⁰

⁷ Peet, Richard, *Unholy Trinity, the IMF, World Bank, and WTO*, Hal. 179, Zed Books, 2009, New York.

⁸ http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2007/01/the_economist_and_the_corn_law

⁹ Dowd Douglas, *Capitalism and Its Economics*, hal 32, Pluto Press, New York, 2001

¹⁰ Frieden, Jeffrey, *Global Capitalism : Its Rise and Fall in the twentieth Century*, Hal. 2, WW Norton Company, 2006, New York

Perkembangan selanjutnya adalah penyebaran kapitalisme dari Eropa ke seluruh dunia, yang sekaligus menjadi titik balik formasi ekonomi politik global. Pembangunan ekonomi nasional kemudian lebih focus pada meletakkan fondasi industrialisasi. Pada akhirnya liberalisme ekonomi menjadi arah bersama ekonomi antar negara terutama sepanjang abad 20.

Ekspansi kapitalisme ke berbagai negara tak bisa dipisahkan dari peran dan motif negara-negara maju. Amerika Serikat tampil sebagai kekuatan hegemonik global setelah 1945 sekaligus berperan sebagai motor utamanya. Ekonomi di Eropa dan Jepang adalah produk dari agenda kapitalisme AS yang dibingkai dalam arus Perang Dingin melawan Blok Soviet. Kemajuan Industrialisasi Eropa dan Jepang sebagian besar ikut dibentuk oleh proyek ambisius AS yakni Marshall Plan. Kebijakan tersebut tidak hanya merefleksikan wujud konfrontasi politik internasional tapi juga agenda ekonomi yang sangat kental. Marshall Plan membuka aliran capital atau modal yang deras terutama ke Eropa dan merangsang eliminasi tariff dan hambatan perdagangan di pasar negara negara Eropa serta AS itu sendiri.¹¹

AS sukses mendirikan blok ekonomi yang juga melibatkan negara-negara sedang berkembang. Pinjaman lunak, Investasi, hingga teknologi dari AS dimanfaatkan terutama untuk rekonstruksi ekonomi Eropa yang hancur akibat Perang Dunia II. Tidak hanya itu, AS juga ikut mengirim tenaga ahlinya (experts) untuk mendesain pembangunan ekonomi dan melakukan supervisi terutama di sejumlah negara-negara berkembang.¹² Kesemua ini terhubung dengan eksistensi kesepakatan Bretton Woods yang telah berjalan dalam kurun waktu yang relatif sama. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan negara maju meningkat pesat selama kurang lebih 25 tahun. Disisi lain, mobilitas dan kuantitas korporasi multinasional (MNC) tumbuh sangat signifikan. Ekonomi internasional bergerak sangat dinamis dibawah komando politik luar negeri AS. Periode ini umumnya dikenal sebagai *Pax*

¹¹ Frieden, Jeffrey, and Lake, David, *International Political Economy, Perspectives on Global Power and Wealth*, Hal.15, Routledge, 2000, New York.

¹² Ibid.

Americana.¹³ Amerika Serikat menjadi actor paling fundamental dalam peta ekonomi global setidaknya selama 30 tahun. Dalam periode tersebut, proyek ekonomi Uni Soviet gagal menyaingi apa yang dicapai Amerika Serikat lewat penyebaran kapitalisme dan liberalism ekonomi di berbagai negara. sistem ekonomi terpusat (centrally- planned economy) diimplementasikan secara terbatas pada beberapa negara saja.

Penciptaan pasar-pasar baru, ekspor-import, atau peningkatan laju barang dan capital dimungkinkan oleh adanya kepemimpinan hegemonic. Amerika Serikat menjalankan peran sebagai pemelihara stabilitas politik dunia dan menjamin kerangka umum (common framework) pembangunan ekonomi negara berorientasi sistem pasar. Dominasi Amerika Serikat ini sebelumnya dipegang oleh negara hegemonic lain pada periode historis yang berbeda, yaitu Inggris. Masa ini dikenal sebagai *Pax Brittanica* yang berlangsung kurang-lebih 100 tahun dari abad 19 hingga awal abad 20.

Tatanan ekonomi global berkembang sangat pesat dan berimplikasi pada berbagai ranah kehidupan. Berakhirnya Perang Dingin, setelah keruntuhan Uni Soviet, menjadi momentum tepat bagi akselerasi ekonomi dunia. Relasi dan kerjasama ekonomi terbangun sangat massif yang ditandai oleh intensifikasi dan keterbukaan pada sector-sektor ekonomi strategis antara Negara. Angka investasi, volume perdagangan, hutang luar negeri, serta peran pasar financial yang begitu tinggi telah menjadi karakter utama dinamika hubungan internasional dewasa ini. Memasuki millennium ketiga, dunia berubah sangat cepat yang kemudian menimbulkan implikasi kompleks, yaitu munculnya ketergantungan (interdependence) dalam hampir seluruh dimensi kehidupan pada level hubungan antara negara bangsa dan hubungan transnasional (transnasional relation).¹⁴ Amerika Serikat lewat proyek Kapitalisme global melenggang mulus sebagai kiblat ekonomi-politik internasional.

¹³ Masa kejayaan dan dominasi Amerika Serikat dalam politik internasional sejak berakhirnya perang dunia 2,1945. Amerika Serikat tampil sebagai pemimpin dan pemegang control terutama dibidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.

¹⁴Budi winarno,*pertarungan Negara vs pasar*, media presindo, Yogyakarta,2009,hal 16

Neoliberalisme diimplementasikan di banyak negara. Kebijakan liberalisasi, deregulasi, hingga privatisasi menjadi orientasi utama sebagian besar negara. Hal tersebut tercermin pada skema Washington Consensus, integrasi ekonomi regional, hingga pembukaan area atau kawasan pasar bebas. Di atas semuanya, WTO muncul sebagai medium perdagangan global yang sangat massif dan berpengaruh.

PARADOKS PERDAGANGAN BEBAS : INTERVENSI NEGARA DAN KONFLIK PERDAGANGAN WTO

Salah satu output paling signifikan dari putaran Uruguay adalah terbentuknya organisasi multilateral perdagangan WTO (World Trade Organization) pada 1994. WTO sendiri adalah hasil dari kesepakatan yang dirancang untuk menyempurnakan kerangka institusional perdagangan dunia. Dalam GATT setiap bentuk perjanjian hanya ada pada konteks kesepakatan antara pemerintah, sementara WTO adalah perwujudan suatu organisasi formal yang sifatnya mengikat secara hukum dan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat. Di sisi lain, GATT hanya berkaitan dengan tarif produk manufaktur, sedangkan WTO menjadi manifestasi dari perluasan mandat GATT dalam beberapa bidang mencakup sektor pertanian, jasa, investasi, serta proteksi terhadap HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Dengan kata lain, eksistensi WTO adalah prestasi terbesar kaum liberal untuk menjamin tegaknya agenda liberalisasi pasar dan perdagangan. Namun begitu, dalam perjalanan WTO, sejumlah persoalan mengemuka akibat tindakan sepihak beberapa Negara yang bersikeras melakukan proteksi perdagangannya.

Proteksionisme perdagangan adalah persoalan paling fundamental dalam pola perdagangan bebas. Secara historis, proteksionisme lebih sering ditemui daripada perdagangan bebas.¹⁵ Isu dan kebijakan ini tidak lagi bertumpu pada sejumlah hambatan klasik yang sebelumnya telah lama mengemuka namun kini mulai mendapat bentuk baru pada konteks isu-isu lain terutama pada apresiasi terhadap hak

¹⁵ Gilpin, Robert dan Gilpin, Jean Mills, *tantangan kapitalisme global*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 84

asasi manusia, pelestarian lingkungan dan standarisasi perlindungan tenaga kerja atau buruh. Isu lingkungan dan standar tenaga kerja selama beberapa tahun belakangan telah menjadi sorotan tersendiri. Kemunculan konflik antara para pembela atau aktivis lingkungan dan proteksi bagi hak-hak dasar buruh dengan para pendukung liberalisasi perdagangan telah menjadi sedemikian rumit. Kontroversi ini menuai protes khususnya dari kelompok gerakan beserta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Negara maju terutama di AS. Mereka menganggap liberalisasi pasar berpotensi besar ikut mendegradasi kualitas ekologi dan pelanggaran terhadap HAM tenaga kerja khususnya di dunia ketiga. Di sisi lain kelompok pendukung liberalisasi perdagangan khawatir bahwa isu ini akan digeser menjadi semacam proteksi yang menghalangi kebebasan pasar.

Ketimpangan dalam rezim perdagangan global sungguh memprihatinkan. Perluasan agenda kerjasama perdagangan yang mencakup bidang-bidang tambahan seperti pertanian, jasa, HAKI, hingga investasi oleh banyak pihak terutama dari Negara selatan sebagai dominasi kepentingan Negara-negara maju. Desakan liberalisasi dalam skala massif telah menciptakan kesulitan dan kerugian yang serius bagi Negara-negara selatan. Tapi secara mengejutkan, Negara-negara maju justru memberlakukan proteksi perdagangan. Misalnya, AS dan UE masih menyuntikan jumlah subsidi yang sangat tinggi terhadap sector pertaniannya. Anehnya, disisi lain mereka menekan Negara-negara sedang berkembang untuk mengurangi subsidi bagi produk pertanian mereka.

Polemic ini direfleksikan pada kasus petani kapas di AS dan EU melawan produk pertanian kapas dari Negara-negara miskin di Afrika. Setiap tahun, pemerintah AS mensubsidi para petani kapasnya sebesar 3 miliar dollar AS dan pemerintah Negara-negara Uni Eropa mensubsidi petani kapasnya sekitar 1 miliar dollar AS per tahun.¹⁶ Pada KTM WTO di Cancun Meksiko 2003 lalu, Negara-negara Afrika Barat mengajukan tuntutan agar AS dan Uni Eropa menghapus subsidi pertanian kapasnya.

¹⁶ Jhamtani, Hira, *WTO dan penjajahan kembali dunia ketiga*, insist press, Yogyakarta, 2004, hal 49

Selama ini, jumlah seluruh subsidi pertanian yang dihabiskan oleh pemerintah AS, Uni Eropa, dan Jepang mencapai 90% dari seluruh subsidi pertanian di dunia. Misalnya, AS memberikan langsung dana sebesar 75 ribu dollar AS per tahun kepada tiap rumah tangga petani padinya. Lebih lanjut, Negara-negara Uni Eropa mensubsidi industri susu sebesar 16 miliar dollar AS tiap tahun. Aksi proteksionisme ini juga berlaku untuk komoditas lain. Dari tahun 1995 sampai 2001 AS dan Uni Eropa terus menyuntikan subsidi yang sangat tinggi untuk komoditas jagung dan gandum mereka. Dalam rentang waktu tersebut total subsidi mencapai angka 311 miliar dollar AS.

Penerapan subsidi bagi sektor pertanian di Negara maju sesungguhnya ancaman dan bahaya yang mematikan bagi petani Dunia Ketiga. Mereka dirugikan dalam dua hal. Pertama, desakan pencabutan subsidi di negaranya sendiri berdampak sangat serius bagi tingkat produktifitas produk yang dapat dihasilkan, dan kedua, produk pertanian yang disubsidi di Negara maju memiliki harga yang lebih murah dan kualitas lebih baik di pasar internasional. Konsekuensi logisnya adalah petani atau pengusaha kecil di dunia ketiga akan rugi karena kalah bersaing. Ancaman kebangkrutan adalah dampak yang paling jelas dalam realitas ini. dalam kasus industri Perikanan negara negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada menyuntikan subsidi dengan nilai total mencapai 10-15 miliar dollar AS tiap tahunnya.¹⁷ Dengan kebijakan seperti ini sektor perikanan negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, Thailand atau Filipina praktis sulit bersaing dengan komoditas perikanan di pasar dunia.

Di bidang hak atas kekayaan intelektual juga menuai protes keras terutama dari Brazil dan India. Penggunaan hak paten pada prinsipnya akan mendorong rakyat Negara miskin kedalam penderitaan. Brazil dan India menentang adanya upaya hak paten dari sejumlah korporasi raksasa farmasi dari Negara maju.¹⁸ Hal ini ditengarai sebagai upaya sistematis untuk menghambat perkembangan dan kemajuan ilmu

¹⁷ Negosiasi dan konflik menyangkut isu ini di WTO dapat juga dilihat dalam karya Gareth Porter, “ Fisheries Subsidies, Overfishing, and Trade”, dalam <http://www.sdnbd.org/sdi/issues/environment/article/1.pdf>

¹⁸ Op.cit

pengetahuan di Brazil dan India khususnya di bidang kedokteran atas penemuan obat-obatan. Konsekuensi paling serius dari kesepakatan HAKI adalah kenaikan harga beberapa produk yang memiliki lisensi atau hak paten dari korporasi luar negeri yang notabene dipasarkan di Negara Negara lain. Pada konteks ini, perlindungan HAKI justru melawan logika kebebasan pasar itu sendiri. Kompetisi terbuka dimana setiap pelakunya bisa berkarya dan menghasilkan barang sengaja ditutup. Dalih yang digunakan adalah perlindungan hasil karya atau penelitian yang sebenarnya masih sangat kontroversial. Ini merupakan salah satu fenomena membingungkan dalam kerangka liberalisasi pasar karean cenderung mengarah pada proteksionisme.

Persoalan paling substansial yang muncul adalah ketiadaan transparansi dan demokratisasi dalam formulasi setiap kebijakan dan kesepakatan di tubuh WTO. Negara Negara maju mengkonsolidasikan diri untuk mendikte dan bahkan secara sepihak merancang dan memutuskan hasil perundingan tanpa keterlibatan Negara-negara berkembang. Dalam beberapa momen delegasi Negara Negara sedang berkembang tidak memiliki ruang dan otoritas yang setara dalam pembuatan keputusan. Keputusan dalam WTO seringkali dipaksakan dalam bentuk consensus mengingat model voting atau pemungutan suara jelas akan menyudutkan posisi Negara maju yang kalah jumlah dari Negara Negara berkembang. Bahkan yang paling kontroversial adalah munculnya istilah *Green Room*. Istilah ini merujuk pada pertemuan kecil yang digagas dan diikuti oleh Negara-negara maju saja dan dilakukan diluar agenda sidang resmi.¹⁹ Hal ini dianggap sebagai medium untuk mendesain keputusan diluar sidang lalu memaksakannya di perundingan resmi WTO.

Isu dan perdebatan proteksionisme selanjutnya semakin menegemuka dengan hadirnya usulan standar tenaga kerja (Core Labour Standard). Khusus untuk isu standar tenaga kerja, ketegangan antara Negara maju dan Negara sedang berkembang cukup rumit. Kritik sebageian besar berasal dari Negara maju dalam hal ini AS yang paling berpengaruh. Industrialisasi dan arus perdagangan yang massif pada gilirannya

¹⁹Setiawan, bonie, *menggugat globalisasi*, INFID dan IGJ, Jakarta, 2001, hal 35

merupakan terror dan eksploitasi bagi para pekerja miskin di dunia ketiga. Daris inilah, peran WTO menjadi krusial. WTO dipandang perlu membuka ruang dialog dan perumusan consensus untuk ikut menjaga tegaknya humanisme dalam kerangka liberalisasi. Isu ini pertamakali mengemuka dan diusung oleh serikat pekerja dan pembela hak asasi manusia. Sementara itu, kebanyakan ekonom menolak gagasan bahwa standar kerja perlu digabungkan kedalam perundingan perdagangan dan berpendapat bahwa tempat yang layak untuk diskusi ini adalah organisasi buruh internasional atau ILO (International Labour Organization).²⁰

Standar tenaga kerja adalah istilah yang secara umum mengacu pada jaminan perlindungan dan perbaikan kualitas kehidupan buruh pada konteks social-politik. Lebih lanjut ILO menjelaskan bahwa standar atau patokan yang mengatur kehidupan dan kerja buruh diluar aspek ekonomi (kuantitatif) atau dengan kata lain standar ini tidak mengatur besarnya gaji, kondisi kerja, maupun keselamatan kerja. Standar kerja yang telah ditetapkan meliputi :

1. Kebebasan berkumpul : para pekerja dapat bergabung dan membentuk serikat pekerja yang independen dan bebas dari pengaruh pemerintah dan perusahaan.
2. Hak untuk bernegosiasi : para pekerja dapat bernegosiasi atau merundingkan masalah secara kolektif dengan pihak perusahaan.
3. Larangan untuk bekerja dibawah pemaksaan : mencakup hak untuk terbebas dari kondisi tekanan dan intimidasi dalam bekerja atau perbudakan di lingkungan kerja.
4. Eliminasi tenaga kerja anak-anak atau dibawah umur : menerapkan batasan usia kerja minimum dan persyaratan tertentu untuk kondisi kerja pekerja anak.

²⁰ Gilpin, Robert dan Jean Millis Gilpin. *Tantangan Kapitalisme Global*. Raja Grafindo Persada. Jakarta (2002). Hal 103.

5. Prinsip non-diskriminasi dalam pekerjaan : pembayaran yang setara untuk kerja yang dihasilkan.²¹

Pada dasarnya, perdebatan tentang implementasi standar kerja dalam ranah liberalisasi industry dan perdagangan berada diluar otoritas dan jangkauan kerja WTO. Sebagai lembaga perdagangan, WTO dianggap tidak memiliki cukup legitimasi untuk mengatur dan mengawasi proses dinamika sektor ketenagakerjaan. Namun begitu, beberapa anggota WTO dari uni eropa dan amerika utara meyakini bahwa isu ini perlu mendapat mediasi dan tindaklanjut dari WTO dalam beberapa bentuk. Peran WTO penting untuk didorong agar keraguan dan kritik dari public terhadap WTO selama ini dapat direduksi dan WTO kembali memperoleh kredibilitas untuk menjalankan proyek liberalisasi perdagangan. Salah satu proposal yang muncul adalah pembentukan sebuah kelompok kerja (working group) dengan tugas mengkaji relevansi standar kerja buruh dan perdagangan bebas.

Dalam sejarah WTO, isu standar kerja pernah dibahas pada pertemuan tingkat menteri yang berlangsung di Marrakesh April 1994 dimana WTO pertamakali dibentuk dan diratifikasi. Hampir semua delegasi pertemuan mengemukakan pandangan menyangkut isu ini tetapi tidak tercapai consensus. Perundingan berakhir dengan kebuntuan karena sulitnya menyatukan persepsi dan mencari korelasi antara isu ketenagakerjaan dengan perdagangan dan yang paling signifikan adalah kekhawatiran terhadap dampak langsung dapat ditimbulkannya dari segi ekonomi. Polarisasi pandangan ini oleh sebagian pihak merupakan salah satu sumber polemic yang tampaknya terus mengendap.

Kebanyakan Negara sedang berkembang mengklaim bahwa isu standar tenaga kerja merupakan bentuk terselubung dari proteksionisme baru. Para pejabatnya menyatakan jika standar ini dibelakukan maka akan menggerogoti keunggulan komparatif Negara sedang berkembang. Bukan lagi menjadi hal baru jika kebijakan

²¹ International Labour Organisation 2006, 'Core Labour Standards Handbook', Manilla
<http://www.adb.org/Documents/Handbooks/Core-Labor-Standards/default.asp> diakses tanggal 31 desember 2010

ketenagakerjaan di negara-negara maju dibentuk secara sentralistik dan politis. Pasar Tenaga Kerja yang bebas dan terbuka hanya menjadi jargon. Upah pada dasarnya ditentukan terlebih dahulu untuk membendung tekanan nilai upah dari para pekerja imigran yang jauh lebih murah dan produktif.²² Mekanisme pasar tak punya efek apa-apa terhadap penentuan Upah Minimum terutama di negara maju di Eropa.

Selama ini keunggulan Negara sedang berkembang berbasis pada sektor tenaga kerjanya yang murah dan melimpah. Dengan fakta kondisi kerja yang buruk, Negara sedang berkembang otomatis sangat mudah jatuh dalam pelanggaran. Seperti yang sudah diketahui sanksi WTO berupa pembatasan pasar bagi anggota yang melanggar aturan dasar dapat menghancurkan pasar dan sirkulasi keuntungan terutama jika diarahkan pada Negara sedang berkembang yang memang tergolong miskin. Singkat kata, Negara sedang berkembang akan kehilangan pasarnya di Negara-negara maju. Selain itu jaminan kebebasan bagi buruh untuk berserikat diinterpretasikan sebagai langkah yang kontraproduktif bagi perkembangan investasi asing di Negara dunia ketiga. Selama ini serikat buruh dikenal seringkali melancarkan aksi protes yang berujung pada instabilitas politik sehingga investor enggan untuk masuk. Disisi lain Negara – Negara kaya diasumsikan memperoleh keuntungan dari pemberlakuan kebijakan ini. Secara ekonomi hal ini berdampak pada hilangnya kompetisi pasar bagi produk Negara maju karena pasar Negara maju tidak akan diramaikan oleh produk dari Negara – Negara sedang berkembang. Atau dengan kata lain produk Negara – Negara maju mendapat proteksi secara ‘tidak langsung’.

Negara – Negara seperti India, Mesir, Indonesia, China, dan Pakistan secara gigih telah melawan adanya ruang perjanjian bagi standar tenaga kerja.²³ Adapun asumsi dasarnya adalah penciptaan relasi isu standar tenaga kerja pada mekanisme perdagangan dapat mereproduksi ketimpangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh

²² Chang, Han Joon, *23 Things They Don't Tell You About Capitalism*, hal. 5, Penguin Books, 2010, London.

²³ Oatley, Thomas, *International Political Economy*. Pearson Education inc, San Francisco 2006. Page 160.

Murasoli Maran, Menteri Perdagangan India, setelah pertemuan WTO di Seattle tahun 1999, ‘banyak Negara sedang berkembang menganggap ini sebagai sebuah manuver dari Negara kaya untuk memaksa kita menaikkan gaji para pekerja sehingga mengikis daya saing kita’²⁴. Masalah ini diperparah oleh konflik lama dalam tubuh WTO menyangkut ketidakseimbangan komposisi kekuatan dalam WTO itu sendiri. Dominasi Negara – Negara kaya di WTO dapat diarahkan untuk memaksakan dimasukkannya isu standar tenaga kerja ini dalam standar perdagangan. Sampai sekarang oposisi dan upaya Negara sedang berkembang bisa dikatakan cukup berhasil dalam menyingkirkan ratifikasi isu ini.

Hal lain yang perlu dikaji juga adalah isu Hak Asasi Manusia. Penegakan HAM sangat berkaitan dengan kondisi kerja para buruh. Asumsi ini kembali menjadi landasan untuk mendorong kebijakan standar tenaga kerja. Fenomena maraknya penggunaan tenaga kerja anak – anak adalah pemicu dari munculnya isu HAM. Dalam masyarakat dengan tingkat pendapatan perkapita yang rendah, anak – anak seringkali menjadi korban untuk bekerja demi menambah pendapatan.

Sejak putaran Uruguay, WTO telah beberapa kali pertemuan tingkat menteri. Pertama adalah KTM Singapura 1996, Jenewa 1998, Seattle 1999, dan Doha 2001. Kontroversi mulai merebak sejak KTM Singapura. Negara Negara maju justru mengajukan 5 isu baru untuk dirundingkan yakni penanaman modal, kebijakan persaingan (kompetisi), pembelanjaan pemerintah, fasilitasi perdagangan, dan klausul social menegenai pengaturan tenaga kerja. Padahal KTM Singapura seharusnya menjadi pertemuan untuk mengkaji ulang kesepakatan Uruguay dan mengidentifikasi masalah yang timbul dari implementasi kesepakatan WTO. Penentangan terhadap 5 isu baru mencul dari Negara-negara berkembang. Pada KTM Jenewa juga tidak mendapatkan kemajuan berarti. Perundingan masih berjalan tanpa transparansi dan partisipasi setara dari Negara Negara berkembang. Puncaknya adalah KTM di Seattle, dimana Negara Negara berkembang membangun afiliasi sendiri dan secara tegas menolak

²⁴ New York Times, December 17th, 1999 dalam , Ibid.

usulan usulan Negara maju. Kelompok ini dikenal dengan LMG (Like Minded Group). Mereka secara aktif mengusulkan 2 hal yaitu kaji ulang atas kesepakatan Uruguay dan masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan WTO.

Dari serangkaian perundingan yang menemui jalan buntu ini, akhirnya diadakan KTM (Konferensi Tingkat Menteri) di Doha 2001. Momentum doha ternyata masih diwarnai oleh protes dari Negara berkembang terhadap isu baru yang diusulkan. Bahkan Negara maju mengajukan proposal yang terdiri atas 19 isu dimana berjumlah lebih banyak dari putaran Uruguay. Deklarasi Doha memandatkan perundingan menyeluruh mengenai pertanian, jasa, subsidi, anti dumping, pengaturan perdagangan antar kawasan, resolusi sengketa, tariff industry, HAKI, dan isu lingkungan. Selain itu, dimunculkan mandat untuk mengintensifkan kembali perundingan singapura untuk isu-isu seperti kebijakan kompetisi, transparansi belanja pemerintah, fasilitasi perdagangan, dan tambahan perdagangan melalui elektronik (*e-commerce*). Dari semua isu ini, secara eksplisit sangat mewakili kepentingan Negara Negara maju. Lalu dimana posisi Negara berkembang? Usulan dan protes Negara berkembang tidak pernah digubris, salah satunya tentang subsidi pertanian AS dan EU, dan dibicarakan lebih jauh. Kesepakatan doha pada akhirnya disepakati lewat serangkaian manipulasi dan intimidasi terhadap Negara berkembang. Hal ini dinyatakan oleh beberapa peserta perundingan Doha.

Putaran doha juga dianggap sebagai putaran pembangunan (*development round*). Namun isi kesepakatan tersebut jelas masih akan menjadi beban dan persoalan baru bagi Negara Negara berkembang. Implementasi atas agenda pembangunan doha diprediksi akan memakan waktu yang lebih lama akibat friksi internal pada tubuh WTO. Oleh karena itu, WTO dan putaran perundingannya masih menyisakan skeptisisme dan tanda tanya besar menyangkut dominasi dan kekuasaan Negara maju dalam menyetir tiap perjanjian dalam kesepakatan perdagangan dunia.

Doktrin neoliberalisme tentang liberalisasi perdagangan tidak pernah diimplementasikan secara serius. Peran WTO untuk menjamin berjalannya

mekanisme liberalisasi justru tidak tampak. Sejumlah kontradiksi ini termanifestasi sebagai inkonsistensi doktrin laissez faire pasar bebas baik secara teoritis maupun praksis. Apa yang disebut sebagai sistem kapitalis sangatlah jauh dari bentuk atau model ekonomi pasar.²⁵

Neoliberalisme perlu dipahami secara dialektis. Pasar dan negara bukanlah oposisi biner. Menarik garis tegas diantara keduanya tak akan dapat menjawab mengapa pasar selalu dapat melakukan ekspansi baik dalam konteks liberalism maupun langkah interventif negara. Krisis ekonomi dapat terjadi oleh praktek institusional dan kebijakan ekonomi yang keliru. Globalisasi ekonomi dibangun oleh 3 pilar keseimbangan, yang kesemuanya saling tarik-menarik dan mempengaruhi, yaitu antara sesama negara, antara Negara dengan pasar global, dan antara negara dengan individu.²⁶ Struktur dan institusi social dapat direkayasa untuk mempermudah kebutuhan pasar. Penetrasi kapitalisme bergerak bukan hanya di wilayah ekonomi namun juga pada wilayah moral, intelektual, dan kebudayaan. Peran Negara adalah menciptakan dan memelihara kerangka yang tepat untuk pelaksanaan kebebasan pasar. Negara harus menjamin kualitas dan integritas uang, serta mengatur militer, pertahanan, polisi serta struktur-struktur legal lainnya untuk memenuhi fungsi yang diperlukan untuk menjaga hak kepemilikan, dan apabila perlu menggunakan kekuatan koersif untuk menjamin fungsi pasar.²⁷ Persepsi bahwa Negara semakin melemah adalah sesuatu yang berlebihan dan tidak kontekstual. Ini akan mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi. Peran Negara sangat signifikan agar dapat memberika jalan dan peluang bagi aliran-aliran modal dan barang internasional.

²⁵ Chomsky, Noam, <https://www.jacobinmag.com/2015/09/noam-chomsky-bernie-sanders-greece-tsipras-grexit-austerity-neoliberalism-protest/>,

²⁶ Friedman, Thomas, *The Lexus and The Olive Tree : Understanding Globalization*, hal 13, Farrar, Straus, and Giroux Publishing, New York, 2000

²⁷ David Harvey, *Neoliberalisme Dan Restorasi Kelas Kapitalis*, Resist Book, Yogyakarta, 2009

KESIMPULAN

Dari pemaparan dan penelusuran diatas maka gagasan dan citra bahwa Negara yang semakin memudar dalam arus globalisasi neoliberal adalah sesuatu yang berlebihan. Negara maju cenderung sangat leluasa dan secara sepihak mendorong kebijakan dan kepentingan nasionalnya. Padahal sikap ini jelas bertentangan dengan propaganda dan anjuran Negara-negara maju selama ini. Pada titik inilah muncul paradoks pasar bebas. Keunggulan prinsip mekanisme pasar yang dianggap berjalan sempurna tidak menemukan relevansinya dengan fakta objektif. Penulis melihat bahwa perdagangan bebas dan ekonomi pasar justru tidak saling “berkontradiksi” dengan peran Negara. Intervensi negara secara objektif muncul sebagai kebutuhan dan resolusi pada banyak kerjasama dan kesepakatan bisnis transnasional, baik yang melibatkan kerjasama antar pemerintah, pemerintah dengan swasta, maupun antar sektor swasta itu sendiri.

Neoliberalisme dalam banyak hal “mensyaratkan” proteksi dan pelayanan negara. konflik perdagangan dalam tubuh WTO perlu dipahami sebagai fenomena yang dialektis. Instrument subsidi, pembatasan, import maupun dominasi negara-negara maju adalah factor-faktor substansial yang mewarnai dinamika ekonomi pasar bebas. Kompetisi antar negara pada derajat tertentu seringkali melahirkan proteksionisme atau kebijakan merkantilis gaya baru. Sengketa perdagangan di WTO dengan demikian membuka lubang teoritis dari skema fundamentalisme pasar. Demistifikasi terhadap semakin tereduksinya peran negara penting dilakukan untuk memperdalam basis analisa kritis bagi formasi dan perkembangan ekonomi-politik internasional kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Chang, Han Joon, *23 Things They Don't Tell You About Capitalism*, Penguin Books, 2010, London

Dowd Douglas, *Capitalism and Its Economics*, Pluto Press, New York, 2001

Frieden, Jeffrey, *Global Capitalism : Its Rise and Fall in the twentieth Century*, WW Norton Company, 2006, New York

Frieden, Jeffrey, and Lake, David, *International Political Economy, Perspectives on Global Power and Wealth*, Hal.15, Routledge, 2000, New York

Friedman, Thomas, *The Lexus and The Olive Tree : Understanding Globalization*, Farrar, Straus, and Giroux Publishing, New York, 2000

Thomas Oatley. *International Political Economy*. Pearson Education inc, San Francisco 2006.

Gilpin, Robert. *Global Political Economy*. Princeton University Press. New Jersey 2001

Peet, Richard, *Unholy Trinity, the IMF, World Bank, and WTO*, Zed Books, 2009, New York.

Manfred B. Streger, *Globalisme-Bangkitnya Ideologi Pasar-*, Lafadl, 2002, Jogjakarta

Gilpin, Robert dan Jean Millis Gilpin. *Tantangan Kapitalisme Global*. Raja Grapindo Persada. Jakarta 2002.

Winarno,budi,*melawan gurita neoliberalisme*,Jakarta,penerbit erlangga,2010.

Jhamtami, Hira. *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*. Insist Press. Yogyakarta 2005

Winarno,budi,*Pertarungan Negara vs pasar*,Yogyakarta,penerbit media pressindo,2009

Coen Husain pontoh, *mcglobal gombal:globalisasi dalam perspektif sosialis*,Yogyakarta, cubic,2001

Setiawan, Bonnie, *Menggugat Globalisasi*, INFID & IGJ, Jakarta, 2001

David Harvey, *Neoliberalisme Dan Restorasi Kelas Kapitalis*, Resist Book, Yogyakarta, 2009

Jackson, Robert, Sorensen, Georg, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, 2013, Yogyakarta

WEBSITE

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm

<http://www.adb.org/Documents/Handbooks/Core-Labor-Standards/default.asp>.

Smith, Nicola, Neoliberalis, Encycopedy of Britannica,
<https://www.britannica.com/topic/neoliberalism>

Chomsky, Noam, <https://www.jacobinmag.com/2015/09/noam-chomsky-bernie-sanders-greece-tsipras-grexit-austerity-neoliberalism-protest/>

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2007/01/the_economist_and_the_corn_w